

PARADOKS SMK (BANGUNAN)

Oleh: M. SYAOM BARLIANA ISKANDAR

“Pemerintah Kota Bandung mendorong pertumbuhan SMK. Target pertumbuhan SMK menjadi salahsatu prioritas kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2007”. Demikian berita Kompas, 19 Desember 2006.

Informasi ini setidaknya dapat disikapi dalam tiga hal. Pertama, pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selama ini belum menjadi prioritas, meskipun dalam skala nasional sudah banyak program diluncurkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan serta merangsang minat masyarakat untuk memasuki SMK. Kedua, tingkat penyerapan siswa SMK yang cenderung stagnan dan bahkan pada beberapa jurusan/program studi terus menurun, memang memerlukan upaya reorientasi, revitalisasi, dan pembukaan program studi pendidikan SMK yang relevan dengan perkembangan industri, konteks lokal, dan orientasi global, seperti dikemukakan oleh Dedy Dharmawan, Kepala Subdinas Pendidikan menengah Kejuruan Disdik Kota Bandung (Kompas, 19/12/2006) Ketiga, perumusan dan implementasi program selayaknya tidak sekedar berbasis pada pendekatan proyek yang cenderung instant dan jangka pendek, tetapi didasarkan pada feasibilitas dan implementasi berkelanjutan.

Dalam rangka pengembangan SMK tersebut, salahsatu Jurusan/Program Studi yang menarik untuk dikaji dan kemudian direvitalisasi adalah SMK Bangunan. Menarik, karena dibandingkan dengan SMK Mesin/Otomotif atau Elektro/Elektronika yang SMKnya berkembang berbanding lurus dengan dunia industrinya, pertumbuhan SMK Bangunan justru berbanding terbalik dengan perkembangan industri konstruksi.

Jelas memang ada persoalan dengan SMK Bangunan ini, yang kondisinya saat ini sangat terpuruk, karena peminat (calon siswa) yang terus menurun. Akibatnya, SMK-SMK Jurusan Bangunan terus berguguran baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Padahal sementara itu, industri konstruksi sebagai lahan kerja sebagai besar

lulusan SMK Bangunan –meskipun pernah mengalami krisis yang parah pada tahun 1998-an- terus bertumbuh. Industri Konstruksi mengalami pasang surut, tapi senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pembangunan yang terus berlanjut. Inilah paradoks SMK Bangunan, seperti “tikus yang mati di lumbung padi”.

Salahsatu persoalan sepinya peminat, karena lulusan SMK Bangunan acap kali dianggap hanya akan menjadi kuli bangunan oleh masyarakat. Padahal, menurut Dedi Darmawan lagi, hal itu tidak benar, karena untuk pembelajaran rancang bangunan sudah digunakan komputersasi semacam *Autocad*. Benarkah demikian? Persoalannya barangkali tidak sesederhana itu.

Pada program keahlian Gambar Bangunan, memang benar apa yang dikemukakan oleh Dedi, namun pada program keahlian yang lain seperti Konstruksi Kayu, Batu, dan Finishing, citra sebagai kuli/tukang bangunan itu memang sangat lekat. Hal ini terjadi, terutama pada kurikulum SMK 1993 yang secara implisit mengarahkan tamatan SMK pada level kualifikasi juru/tukang bangunan. Asumsi dasarnya, adalah beranalogi misalnya dengan tamatan SMK Mesin/Otomotif sebagai Montir. Padahal, konteks sosial, ekonomi, dan kultural diantara keduanya sangat berbeda.

Secara sosiologis, meskipun levelnya sama-sama tukang, montir menempati posisi dan gengsi sosial yang jauh lebih tinggi daripada tukang bangunan. Secara ekonomi, level penghargaan kepada montir jauh lebih tinggi daripada kepada tukang bangunan. Secara kultural, sebagai akibat dari kondisi sosial ekonomi semacam itu, maka profesi tukang bangunan lebih banyak diisi oleh tenaga-tenaga migran yang tidak terdidik. Hal ini berbeda dengan di Negara-negara maju yang tidak mengalami hambatan sosial-ekonomi dan tradisi semacam itu.

Paradigma kurikulum semacam itu hanya dapat dipertahankan jika prasyarat sosial, ekonomi, dan budayanya berubah. Misalnya, asosiasi-asosiasi yang bergerak di dunia industri, mempersyaratkan anggotanya untuk hanya memakai tenaga-tenaga kerja tukang bangunan terdidik dan memiliki sertifikat. Ini berarti pula, menaikkan level penghargaan ekonominya sehingga setara dengan level montir misalnya.

Hal itu tampaknya masih akan sulit dilakukan, bahkan untuk waktu jangka waktu 20 – 30 tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, satusatunya cara adalah mengubah orientasi kurikulum pendidikan SMK Bangunan, yang tampak sudah ada usaha ke arah itu pada kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Pada kurikulum maupun standar kompetensi SMK Bangunan, diintrodusir level kualifikasi “pelaksana” dan bukan “juru atau tukang” misalnya.

Meskipun demikian, tampaknya usaha itu belum akan mengikis citra negatif tentang SMK Bangunan. Persoalannya, meskipun disebut pelaksana, sebagian besar level kompetensi dan spesifikasi keahlian bangunan baik pada program keahlian Gambar Bangunan, Konstruksi Kayu, Kontruksi Baja, dan Finishing dapat dikerjakan oleh tenaga tukang bangunan yang tidak terdidik. Bahkan, karena tenaga tidak terdidik ini melalui proses belajar sambil bekerja (magang) dan belajar dari pengalaman, meskipun secara teoritik lemah, tapi umumnya keahlian dan kerja kerasnya akan jauh lebih baik dari pada tamatan SMK.

Bukan Sekedar Nama

Wacana untuk mengubah nama dari SMK Bangunan menjadi Sipil dan atau Arsitektur mengikuti disiplin ilmu program studi di perguruan tinggi dan terminologi yang dikenal luas di masyarakat industri konstruksi memang sudah lama dicuatkan, dalam rangka mengangkat citra SMK Bangunan tersebut. Hal ini bahkan sudah dilakukan di LPTK penghasil guru SMK Bangunan, seperti di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) misalnya. Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan dikembalikan dan dipisah kembali menjadi Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Jurusan Pendidikan Arsitektur.

Perubahan nama ini tampaknya sangat penting di tengah masyarakat yang masih mementingkan bungkus ketimbang substansi, atau setidaknya menganggap kemasan sama pentingnya dengan isi. Pada masyarakat konsumen dewasa ini, bahkan kemasan dan “merk” seringkali jauh lebih penting daripada isi. Meski demikian, reorientasi substansi kurikulum juga penting untuk dilakukan, terlebih lagi dengan diterapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), ysnng

memungkinkan sekolah secara fleksibel mengembangkan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kondisi yang ada.

Berdasarkan argumen yang sudah dikemukakan di atas, tampaknya akan lebih feasibel dan menarik minat siswa, jika kurikulum hanya diarahkan pada program keahlian dan kompetensi yang tidak bisa dilaksanakan oleh level Tukang Bangunan, serta pada ketrampilan manajemen kordinasi pekerjaan (level pelaksana atau mandor). Artinya, mengikuti analisis sosial, ekonomi, dan kultural di atas, program keahlian di SMK tidak perlu menyentuh ketampilan “tenaga kasar”. Misalnya kurikulum di arahkan pada ketrampilan gambar digital (dwi/tridimensi dan animasi komputer), survai pengukuran dan pemetaan dengan GPS, ketrampilan kayu untuk interior dan *display* barang di supermarket dan mal, ketrampilan pengolahan material bangunan di industri bahan bangunan, dan lain-lain.

Dengan demikian, beban kurikulum menjadi lebih ramping, spesifikasi keahlian lebih terfokus, serta muatan praktek lebih tinggi dan waktu praktek lebih panjang. Selanjutnya, dengan orientasi pada ketrampilan yang tinggi serta citra yang lebih baik, mudah-mudahan SMK Bangunan memiliki prospek yang lebih baik.

M. SYAOM BARLIANA ISKANDAR

Dosen Jurusan Pendidikan Arsitektur

Universitas Pendidikan Indonesia

Jl, Guruminda No 39,

Kampus UPI, Gegerkalong Bandung.

Telp. 081321512163